

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN INTERNAL CONTROL TERHADAP INDIKASI TERJADINYA FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Rahmayani ^{*1}, Rahmawaty ^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: rahmayani.au@gmail.com ^{*1} rahmawaty@unsyiah.ac.id ^{*2}

Abstrak

The purpose of this study is to examine the effect of independent variables on fraud of Indonesian Islamic banks in the period of 2011-2015. Independent variables that used in this study are Islamic corporate governance with the execution of duties and responsible of Shariah Supervisory Board and the execution of duties and responsible of management as an indicator and internal control. By using purposive sampling method, from 12 Islamic banks in Indonesian, 9 Islamic banks are chosen as the samples in this study. The type of data used in this study are secondary data which is good corporate governance statement. Collecting data technique used in this study is documentary. Data are analyzed by statistical analysis using a multiple regression analysis and are processed by IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) 23th version program. The results of this study show that 6,1% dependent variable or fraud can be explained by the three of independent variables. Simultaneously the three of independent variables have no effect on fraud. Partially the execution of duties and responsible of Shariah Supervisory Board and the execution of duties and responsible of management and internal control have no effect on fraud.

Keywords: *Fraud, Islamic Corporate Governance, Shariah Supervisory Board, management, internal control.*

1.1. Pendahuluan

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, pembiayaan dan dalam bentuk kredit serta dalam bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perkembangan sektor perbankan di Indonesia menarik untuk dicermati terutama terkait dengan pasang surut yang dialami oleh industri perbankan di Indonesia. Saat ini di Indonesia dikenal ada dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau yang disebut bank syariah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur

dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*mashahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram. Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Salah satu prinsip dalam perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil sesuai dengan kaidah ajaran Islam.

Bank Islam pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992 (Yaya, 2013:17). Saat ini perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat. Perkembangan tersebut terlihat perkembangan kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia

RASIO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CAR	16,63%	14,13%	14,42%	15,94%	15,02%	15,95%
ROA	1,79%	2,14%	2,00%	0,85%	0,49%	0,63%
NPF	2,52%	2,22%	2,62%	4,08%	4,84%	4,42%
FDR	88,94%	100,00%	100,32%	98,97%	88,03%	85,99%
BOPO	78,41%	74,97%	78,21%	81,02%	97,01%	96,23%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2016

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan rasio-rasio kinerja keuangan dari bank umum syariah di Indonesia selama tahun 2011-2016. Rasio-rasio tersebut dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam data statistik perbankan syariah tahun 2016. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tidak semua rasio kinerja keuangan mengalami peningkatan. CAR mengalami peningkatan, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2012. Peningkatan CAR menandakan bahwa posisi modal bank umum syariah di Indonesia dalam keadaan yang baik. Walaupun sempat menurun, namun CAR dari bank umum syariah ini tetap di atas rata-rata dari minimum CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 8%. Demikian juga untuk rasio-rasio keuangan lainnya. Seiring dengan berkembangnya bank syariah maka semakin besar tantangan yang harus dihadapi oleh bank syariah. Meskipun bank syariah menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah namun hal itu tidak menjamin bank syariah bebas dari tindak kecurangan (*fraud*).

Di Indonesia telah banyak terjadi kasus-kasus *fraud* di lembaga syariah. Seperti kasus yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri cabang Bogor terkait penyaluran fiktif yang melibatkan pihak internal bank yaitu sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Kerugian yang diakibatkan dari kejadian tersebut yaitu sebesar 59 miliar rupiah, dan Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai BSM (Kusumadewi, 2013). Selain kasus tersebut juga terdapat beberapa kasus yang terjadi, seperti kasus yang dialami oleh BRI syariah dan Bank Mega Syariah yang merasa

dirugikan terkait gadai emas yang ada pada BRI syariah dan Bank Mega Syariah (Wijaya, 2012) (Sadikin, 2014). Di negara lain juga banyak terjadi kasus pada bank syariah, seperti kasus yang terjadi pada *Dubai Islamic Bank* yang kehilangan sekitar US\$ 300 miliar akibat laporan keuangan yang tidak tepat dan pada *Islamic Bank of South Afrika* yang bangkrut pada tahun 1997 dengan hutang antara R50 hingga R70 juta yang disebabkan oleh manajemen yang buruk serta sistem akuntansi dan manajemen yang tidak tepat (Rini, 2014). Kasus tersebut membuktikan bahwa lembaga syariah dan bank yang berbasis syariah tidak menjamin bebas dari tindakan *fraud*. Setiap organisasi memiliki risiko terjadinya *fraud* dengan segala bentuk dan modusnya.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Fraud* dalam suatu organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan baik dari pihak manajemen sampai pemilik (Anugerah, 2014). Tuanakotta (2007) dalam Anugerah (2014) menerangkan bahwa ada 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud* atau disebut dengan *fraud triangle*. Pertama adanya motif atau tekanan (*incentive/pressure*), kedua adanya kesempatan (*opportunity*), dan ketiga adanya rasionalisasi

(*rationalization/attitude*) dan kecenderungan perilaku untuk membenarkan tindakannya. Untuk itu entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud* (Sula et al, 2014).

Menurut Hameed et al. (2004) dalam Najib dan Rini (2016) menyatakan bahwa untuk memenuhi kepatuhan bank syariah merekomendasikan *Islamic Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan berlandaskan tiga indikator pengungkapan islami, yaitu *sharia compliance*, *corporate governance* dan *social/environment disclosure*. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan (Agoes, 2014:107). *Good Corporate Governance* (GCG) dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara *stakeholders* dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan (Faozan, 2014).

Pengoperasian bank syariah tidak terlepas dari tuntutan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebut sebagai *Islamic Corporate Governance*. Bhati dan Bhati (2010) dalam Asrori (2014) mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai berikut:

“Islamic corporate governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agents, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on shari’ah Laws. Its supporters believe that all economic, corporate, and business activities should be based on an ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society as a whole. In many ways, ICG pursues the same objectives as conventional corporate governance, but within the religious-based moral codes of Islam. A modal of ICG may be proposed by reconciling the objectives of Shari’ah laws with the stakeholder model of corporate governance.”

Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank

terhindar dari praktik kecurangan. *Self Assessment Good Corporate Governance* merupakan salah satu wujud komitmen *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara berkala dan mengacu pada parameter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. *Self Assessment* digunakan sebagai paradigma untuk mengukur atau menilai kesehatan perbankan syariah. Terdapat 11 indikator atau komponen penilaian *Good Corporate Governance* pada *Self Assessment*. Indikator-indikator tersebut adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Berdasarkan indikator-indikator GCG tersebut, terdapat dua Indikator *Islamic Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi/Direktur. Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak terafiliasi untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam melaksanakan aktivitas perbankan syariah (Faozan, 2013). Tugas dan wewenang DPS adalah melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya (Yaya, 2013:28). Dewan Pengawas Syariah juga bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi. Dewan Direksi pada perbankan syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini karena kedua indikator tersebut telah digunakan sebagai variabel dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) menggunakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai indikator dari *Islamic Corporate Governance*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Charles et al. (2012) juga menggunakan karakteristik DPS

sebagai indikator dari *Islamic Corporate Governance*. Maradita (2014) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagai elemen pendukung bagi implementasi prinsip GCG pada bank syariah. Berdasarkan penelitian tersebut, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi merupakan indikator penting untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dan terhindar dari indikasi terjadinya *fraud* pada perbankan syariah.

Selain menerapkan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam, salah satu faktor penting yang harus dimiliki dan diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi kecurangan adalah *internal control* yang baik. Lemahnya *internal control* juga dapat menjadi pendorong bagi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan *fraud* (Anugerah, 2014). Pengendalian internal disebut juga sebuah kerangka kerja terintegrasi adalah sebuah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal (Warren, 2015:400). Bagi manajemen sebuah entitas memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menjaga pengendalian internal (Yuwannita, 2016). Kecenderungan kecurangan berkaitan dengan sistem pengendalian internal yang ada di sebuah organisasi, dimana pengendalian internal yang baik menyebabkan sebuah organisasi terhindar dari adanya kecurangan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014), Anugerah (2014), dan Manurung et al. (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) adalah terletak pada variabel dependennya, dimana kinerja bank syariah menjadi variabel dependen dan *Islamic Corporate Governance* sebagai *variabel independen*, sedangkan dalam penelitian ini *variabel dependen* yang digunakan adalah *fraud*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugerah (2014) adalah pada populasi yang digunakan dimana Anugerah (2014) meneliti peran *Good Corporate Governance* dalam pencegahan *fraud* pada lembaga konvensional sedangkan penelitian ini menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *fraud* pada bank syariah.

Selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Manurung et al. (2015) ialah terletak pada variabel independen dan *variabel*

moderating, dimana Manurung et al. (2015) menggunakan *organizational commitment* sebagai *variabel independen* terhadap *fraud employee* sebagai *variabel dependen* dengan *internal control* sebagai variabel moderatingnya, sedangkan pada penelitian ini *internal control* digunakan sebagai *variabel independen* untuk melihat pengaruhnya terhadap indikasi terjadinya *fraud*. Perbedaannya juga terletak pada indikator atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur *internal control*. Penelitian yang dilakukan oleh Manurung et al. (2015) *internal control* diukur menggunakan *kuesioner*, sedangkan dalam penelitian ini indikator atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur *internal control* yaitu menggunakan nilai komposit hasil *self assessment* yang dilaporkan dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bank umum syariah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap indikasi terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud*

Pengoperasian bank syariah harus berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate Governance*) dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau yang disebut dengan *Islamic corporate governance*. Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah maka diperlukan adanya pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (El Junusi, 2012). DPS bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu, pengelolaan bank syariah dengan berdasarkan prinsip-prinsip Islam akan berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan DPS.

Hal tersebut akan memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa bank syariah terhindar dari praktik kecurangan (*fraud*) (Najib & Rini, 2016).

Belum banyak peneliti yang menguji pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS terhadap *fraud*. Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai tata kelola perusahaan pada bank syariah, seperti yang dilakukan oleh Asrori (2014) dalam penelitiannya tentang implementasi *corporate governance* dan implikasinya terhadap bank syariah menyatakan bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Anugerah (2014) mengenai peranan GCG dalam pencegahan *fraud* juga menyatakan bahwa pengimplementasian mekanisme internal dan eksternal *corporate governance* dengan memperhatikan prinsip dan fungsi dapat mengurangi terjadinya *fraud*. Mollah dan Mahbud (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan pengaruhnya terhadap *fraud* sebagaimana yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa semakin baik penerapan tata kelola perusahaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS maka diharapkan dapat mengurangi jumlah *fraud* yang terjadi pada bank syariah. Untuk melakukan penilaian terhadap baik tidaknya penerapan tata kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS. Surat Edaran BI tersebut untuk menilai penerapan tata kelola perusahaan dilihat dari nilai komposit hasil *self assessment*, yaitu semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan semakin baik penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai komposit pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS hasil *self assessment* bank syariah diharapkan dapat mengurangi jumlah *fraud* yang terjadi.

2.2 Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud*

Pelaksanaan GCG bank umum syariah harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank umum syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah (*Islamic corporate governance*). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank umum syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang berjalan dengan baik sesuai dengan *Islamic corporate governance* dapat mengurangi indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai tata kelola perusahaan pada bank syariah, Asrori (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Anugerah (2014) juga menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* dengan memperhatikan prinsip dan fungsi serta peran komite audit dapat mengurangi terjadinya *fraud*.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai *Islamic corporate governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengaruhnya terhadap *fraud* sebagaimana yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa semakin baik penerapan tata kelola perusahaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka diharapkan dapat mengurangi indikasi *fraud* yang terjadi pada bank syariah. Untuk penilaian penerapan tata kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS.

2.3 Pengaruh *Internal Control* Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud*

Internal control merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan

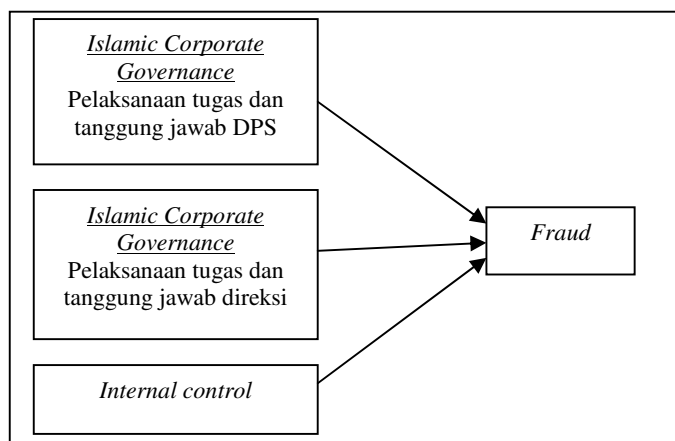
personel lain dalam suatu organisasi. Pengendalian internal disebut juga sebuah kerangka kerja terintegrasi adalah sebuah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi aktivitas dalam perusahaan (Warren, 2015:400). Jika pengendalian internal suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perusahaan sangat besar (Agoes, 2012:103). Lemahnya *internal control* juga dapat memicu tindakan individu atau sekelompok untuk melakukan kecurangan yang sebelumnya tidak terpikir untuk melakukannya, dikarenakan mereka melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan (Anugerah, 2014). Salah satu penyebab terjadinya *fraud* adalah kelemahan pengendalian internal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya bagian internal audit dalam suatu perusahaan (Agoes, 2013:213). Fungsi internal audit yaitu memberikan jasa penjaminan dan konsultasi kepada perusahaan untuk efisiensi operasi dan pengendalian internal (Anugerah, 2014). Oleh karena itu, peranan internal auditor sangat besar sekali dalam mencegah terjadinya kecurangan maupun dalam melakukan investigasi jika kecurangan sudah terjadi (Agoes, 2013:216).

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai *internal control*, seperti yang dilakukan oleh Manurung et al. (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Organizational commitment* berpengaruh negatif terhadap *employee fraud* dengan *effectiveness of internal control* sebagai variabel moderating. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Thoyibatun (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesesuaian sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap perilaku tidak etis. Penelitian yang dilakukan oleh Spatacean (2012) juga menyatakan bahwa peningkatan efektivitas dari *internal control* akan mengurangi risiko terjadinya *fraud*.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai *internal control* dan pengaruhnya terhadap *fraud*, maka dapat diketahui bahwa penerapan *internal control* yang baik dalam bank syariah dapat mengurangi indikasi terjadinya *fraud* dengan berfungsinya bagian *internal audit* dalam bank syariah. Untuk menilai baik tidaknya penerapan *internal control* dalam bank umum syariah dapat dilihat dari nilai komposit penerapan fungsi audit intern hasil *self assessment* yang terdapat dalam

laporan pelaksanaan GCG bank umum syariah sesuai dengan Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, maka skema kerangka pemikiran tentang pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dan *internal control* terhadap indikasi terjadinya *fraud* dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis

- H1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dan *internal control* secara bersama-sama berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah.
- H2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah.
- H3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah.
- H4: *Internal control* berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah.

3. Metode Penelitian

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah bagan (*blueprint*) untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data, berdasarkan pada permasalahan studi penelitian (Sekaran & Bogie, 2013:95). Desain penelitian merupakan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun dan menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Sekaran dan Bogie (2013:96) juga menjelaskan bahwa desain penelitian berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu penelitian.

- 1) Tujuan penelitian
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan *internal control* terhadap variabel dependen yaitu indikasi terjadinya *fraud* melalui pengujian hipotesis.
- 2) Jenis penelitian
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas merupakan jenis penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel (Sekaran & Bougie, 2013:98).
- 3) Tingkat intervensi peneliti
 Dalam penelitian ini, tingkat intervensi peneliti adalah minimal, yaitu hanya untuk mempelajari pengaruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan *internal control* terhadap indikasi terjadinya *fraud*.
- 4) Situasi penelitian
 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan situasi yang tidak diatur (*noncontrived*) yaitu tanpa ikut campur terhadap kegiatan rutin perusahaan (Sekaran & Bougie, 2013:100).
- 5) Unit analisis
 Unit analisis yang digunakan adalah tingkat organisasional, yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015.
- 6) Horizon waktu
 Horizon waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *pooling/panel data*. *Pooling data/panel data* yaitu gabungan *times series* dan *cross sectional*, dimana studi ini mengambil sampel pada beberapa perusahaan dan beberapa waktu yang berbeda (Gujarati, 2003:363).

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok grup orang, kejadian, orang atau suatu hal yang menjadi suatu kepentingan peneliti untuk investigasi (Sekaran & Bogie, 2013:240). Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS), Sampel adalah bagian dari populasi, yang menjadi anggota populasi yang terpilih untuk dijadikan penelitian (Sekaran & Bogie, 2013:241). Pemilihan sampel berdasarkan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia secara berturut-turut untuk periode 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015.
- 2) Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam *website* masing-masing BUS untuk periode 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015.
- 3) Mengungkapkan data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap.

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian inidapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Bank Syariah
1	BUS yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015	12
2	BUS yang data laporan GCG tersedia dengan lengkap	10
3	BUS yang data laporan GCG tidak tersedia dengan lengkap	(3)
Jumlah sampel tiap periode		9
Periode penelitian		5
Jumlah sampel akhir		45

Sumber: Data diolah (2016)

3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sekaran dan Bougie (2013) sumber data terdiri dari “data primer (mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama) dan data sekunder (data yang sudah ada dan tidak harus dikumpulkan oleh peneliti). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelusuran data online, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran *website*. Data yang diperlukan untuk

penelitian meliputi laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Pengambilan data yang diperoleh dari *website* resmi masing-masing bank umum syariah

3.4 Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Variabel Independen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *fraud*. *Fraud* adalah suatu perbuatan yang mencakup akal muslihat, kelicikan, dan ketidakjujuran dengan cara-cara yang tidak layak/wajar untuk menipu orang lain yang menimbulkan keuntungan untuk diri sendiri dan kerugian bagi pihak lain (John Wiley & Sons, Inc., 2010:5). *Fraud* atau kecurangan merupakan segala tindakan yang dapat membawa dampak buruk dan kerugian bagi perusahaan.

Fraud dalam penelitian ini diukur dengan melihat jumlah *internal fraud* yang terjadi di bank umum syariah yang diungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG masing-masing bank umum syariah (Najib & Rina, 2016). Jumlah *internal fraud* digunakan untuk menilai indikasi terjadinya *fraud* dikarenakan penelitian ini berfokus pada *fraud* yang terjadi dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) atau disebut dengan *internal fraud*. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio.

3.4.2 Variabel Independen (X)

3.4.2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS merupakan salah satu indikator dari *Islamic corporate governance*. Tugas dan wewenang DPS adalah melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah, mengajukan usulan pengembangan lembaga syariah kepada DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Yaya, 2013:27). DPS bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dalam penelitian ini diukur dengan melihat nilai komposit *self assessment* yang terdapat dalam laporan pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh bank umum syariah. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio.

3.4.2.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi merupakan salah satu indikator dari *Islamic corporate governance*. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pelaksanaan GCG bank umum syariah harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam penelitian ini diukur dengan melihat nilai komposit hasil *self assessment* yang terdapat dalam laporan pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh bank umum syariah. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio.

3.4.2.3 Internal Control

Internal control merupakan proses yang dijalankan oleh manajemen untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Untuk menilai apakah pengendalian internal telah berjalan dengan baik maka tidak terlepas dari adanya *internal audit* dalam suatu institusi. Salah satu penyebab terjadinya *fraud* adalah kelemahan pengendalian internal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya bagian internal audit dalam suatu perusahaan (Agoes, 2013:213).

Untuk menilai efektif tidaknya *internal control* dalam bank umum syariah, maka *internal control* dalam penelitian ini diukur dengan melihat nilai komposit hasil *self assessment* penerapan fungsi audit intern yang terdapat dalam laporan pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh bank umum syariah. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel *Islamic corporate governance* yang diprosikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dan variabel *internal control* terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Dalam penelitian ini objek penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling* yang menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* masing-masing BUS, BUS yang terdaftar di Bank

Indonesia periode 2011-2015 adalah 12 BUS. Berdasarkan sampel penelitian pada Tabel 3.2, diperoleh sampel pada penelitian ini sebanyak 9 bank. Panel data yang digunakan yaitu *balanced data* dimana setiap observasi periode waktu memiliki jumlah perusahaan yang sama sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 45 observasi untuk periode pengamatan 2011-2015. Daftar lengkap perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria dapat dilihat pada Lampiran 2.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu teknik analisis regresi berganda. Data diolah dengan menggunakan program IBM *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 23. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan uji asumsi klasik untuk membuktikan bahwa data telah bebas dari uji asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis..

4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013:160). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* untuk menguji distribusi data. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	13,54822548
Most Extreme Differences	Absolute	,246
	Positive	,246
	Negative	-,242
Test Statistic		,246
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah (2017)

Pada Tabel 4.1 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Untuk mengatasi hal tersebut, Menurut Ghozali (2013:173) untuk menormalkan data dilakukan dengan cara mengubah data ke dalam bentuk logaritma natural, sehingga data yang dihasilkan terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas yang sudah diubah dalam bentuk logaritma natural dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas dengan Data dalam Bentuk Logaritma Natural

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		26
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,31033907
Most Extreme Differences	Absolute	,136
	Positive	,136
	Negative	-,071
Test Statistic		,136
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah (2017)

Hasil uji normalitas dengan data dalam bentuk logaritma natural pada Tabel 4.2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat korelasi dua atau lebih variabel independen dalam sebuah model regresi berganda (Sekaran & Bogie, 2013:319). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya *multikolinearitas* di dalam regresi maka perlu untuk melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *Tolerance*. Nilai batas yang digunakan untuk menunjukkan *multikolinearitas* adalah nilai $VIF \leq 10$ atau nilai *tolerance* $\geq 0,1$. Hasil

pengujian *multikolonieritas* dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 yang datanya sudah diubah dalam bentuk logaritma natural.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,340	2,938
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	0,351	2,848
<i>Internal control</i>	0,878	1,139

Sumber: Data diolah (2017)

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas dengan Data dalam Bentuk Logaritma Natural

Variabel	Tolerance	VIF
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,408	2,452
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	0,418	2,390
<i>Internal control</i>	0,917	1,091

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 yang datanya sudah diubah dalam bentuk logaritma natural dapat dilihat bahwa variabel independen memiliki nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat *multikolinearitas* antara variabel independen dalam model regresi.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode *t-1* (tahun sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari auto korelasi (Ghozali, 2013:110). Untuk menguji auto korelasi dalam model regresi dalam penelitian ini menggunakan *run test*. Hasil pengujian auto korelasi dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

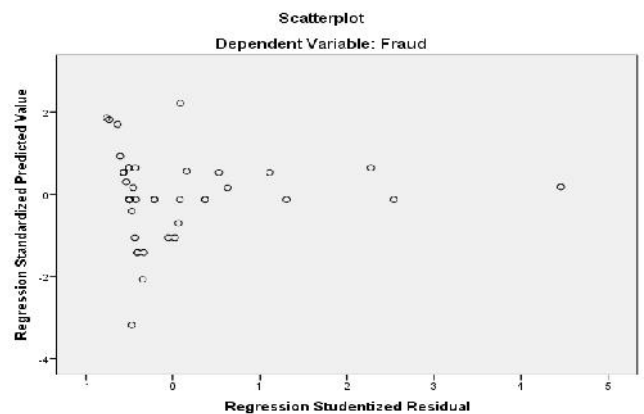
Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0,12138
Cases < Test Value	13
Cases >= Test Value	13
Total Cases	26
Number of Runs	13
Z	-0,200
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,841

Sumber: Data diolah (2017)

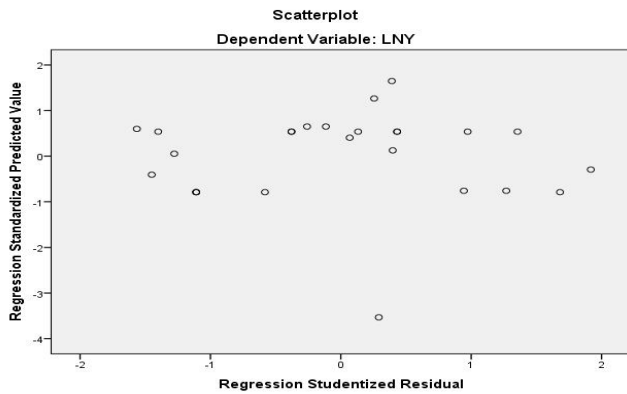
Berdasarkan Tabel 4.5 hasil *run test* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,841 lebih besar dari 0,05 yang berarti hipotesis nol gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi dan dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya *heteroskedastisitas*. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 yang datanya sudah diubah dalam bentuk logaritma natural.



Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Output SPSS, 2017)



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Data dalam Bentuk Logaritma Natural (Output SPSS, 2017)

Berdasarkan Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 yang datanya sudah diubah dalam bentuk logaritma natural menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola yang jelas. Titik-titik menyebar di bawah titik nol dan diatas titik nol. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Metode Regresi Linear Berganda

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan *internal control*, terhadap variabel dependen yaitu *fraud*. Hasil regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	B
(Constant)	1,586
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,454
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	0,177
<i>Internal control</i>	-0,534

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda yang baru, yaitu:

$$Y = 1,586 + 0,454X_1 + 0,177 X_2 - 0,534X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda yang baru dapat diketahui bahwa:

- 1) Konstanta (α) sebesar 1,586 menunjukkan bahwa jika pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dan *internal control* secara bersama-sama tetap atau tidak mengalami perubahan atau nol, maka besarnya *fraud* adalah sebesar 1,586.
- 2) Koefisien regresi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebesar 0,454, nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dengan variabel *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebesar 1 satuan maka terjadi peningkatan *fraud* sebesar 0,454 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- 3) Koefisien regresi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi sebesar 0,177, nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dengan variabel *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi sebesar 1 satuan maka terjadi kenaikan *fraud* sebesar 0,177 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- 4) Koefisien regresi *internal control* sebesar -0,534, nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan tidak adanya hubungan yang searah antara variabel *internal control* dengan variabel *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *internal control* 1 satuan maka terjadi penurunan *fraud* sebesar -0,534 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

4.3.2 Koefisien Determinasi (R²)

Pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui kekuatan pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Penentuan kekuatan model penelitian dapat dilihat dari nilai R², dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	,247 ^a	,061	-,067	1,39683	1,613
a. Predictors: (Constant), LNX3, LNX2, LNX1					
b. Dependent Variable: LNY					

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,061 atau 6,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa 6,1 % variabel dependen atau *fraud* dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan *internal control*, sedangkan 96,1% sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Hasil pengujian statistik F dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,786	3	0,929	0,476	0,702
Residual	42,925	22	1,951		
Total	45,711	25			

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,702 dan lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan *internal control* secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *fraud*.

4.3.3 Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013,98). Hasil pengujian statistik t dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	1,586	1,718		0,92	0,366
LNX1	0,454	1,190	0,123	0,38	0,706
LNX2	0,177	1,127	0,050	0,15	0,877
LNX3	-0,534	0,567	-0,203	-0,94	0,356

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa:

- 1) Hasil pengujian pada variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS didapatkan nilai t hitung 0,382. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,706, artinya variabel *Islamic Corporate Governance* dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh terhadap *fraud* ditolak.
- 2) Hasil pengujian pada variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi didapatkan nilai t hitung sebesar 0,157. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,877, artinya variabel *Islamic Corporate Governance* dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi berpengaruh terhadap *fraud* ditolak.

Hasil pengujian pada variabel *internal control* didapatkan nilai t hitung sebesar $-0,943$. Nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$, yaitu $0,356$, artinya variabel *internal control* tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan *internal control* berpengaruh terhadap *fraud* ditolak.

4.4 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka berikut akan dibahas pengaruh variabel independen, yaitu *Islamic Corporate Governance* dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan variabel *internal control* terhadap variabel dependen yaitu *fraud*.

4.4.1 Pengaruh Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab DPS, Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi, Dan Internal Control Secara Bersama-Sama terhadap Indikasi Terjadinya Fraud

Berdasarkan hasil pengujian statistik, secara bersama-sama variabel *Islamic Corporate Governance* dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan variabel *internal control* tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian menolak hipotesis yang pertama (H_1).

Hal ini diperkirakan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara parsial semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga menyebabkan pengujian secara bersama-sama variabel independen juga tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebabnya adalah lemahnya mekanisme *corporate governance* internal (Anugerah, 2014), sulitnya penerapan tata kelola perusahaan secara islami, dan lemahnya pengendalian internal yang disebabkan oleh kurang efektifnya peran audit internal perusahaan (Agoes, 2013:213).

4.4.2 Pengaruh Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS terhadap Indikasi Terjadinya Fraud

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS merupakan salah satu indikator dari terlaksananya tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam (*Islamic Corporate Governace*). Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil pengujian statistik, secara parsial pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa, hasil pengujian menolak hipotesis kedua (H_2).

Berdasarkan teori yang ada penerapan tata kelola perusahaan secara islami merupakan hal yang sangat penting dan memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa perbankan syariah terhindar dari praktik kecurangan. Pengelolaan bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip islam akan berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan DPS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap *fraud* diperkirakan karena dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk menerapkan tata kelola perusahaan dengan prinsip syariah secara maksimal. Keberadaan DPS tidak menjamin perbankan syariah terhindar dari indikasi terjadinya *fraud*, jika DPS hanya melakukan peran sebagai penasehat (Mollah & Zaman, 2015). Lemahnya mekanisme *corporate governance* internal juga merupakan salah satu penyebab terjadinya *fraud* (Anugerah, 2014). Kelemahan mekanisme *corporate governance* internal perbankan syariah utamanya menyangkut kompetensi DPS dan pemenuhan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasionalnya (Asrori, 2014).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Najib & Rini (2016) yang menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) menyatakan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap *Islamic bank Performance* jika hanya melakukan peran sebagai penasehat. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugerah (2014) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* dapat mengurangi tingkat *fraud*. Penelitian yang

dilakukan oleh Asrori (2014) juga menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja islami bank syariah

4.4.3 Pengaruh Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi terhadap Indikasi Terjadinya Fraud

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi merupakan salah satu indikator dari *Islamic corporate governance*. Berdasarkan hasil pengujian statistik, secara parsial pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian menolak hipotesis ketiga (H_3).

Berdasarkan teori menyatakan bahwa direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dan wajib melaksanakan ICG dalam setiap kegiatan usaha BUS. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hal ini diperkirakan karena sulitnya penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam. Bank syariah di Indonesia masih terbilang baru dan masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan, sehingga tidak bisa dikatakan telah menerapkan prinsip islam sepenuhnya. Hal ini membuat dewan direksi kesulitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola BUS. *Fraud* dalam organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan baik dari pihak manajemen sampai dengan pemilik (Anugerah, 2014). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi tidak akan menjamin perbankan syariah terhindar dari indikasi *fraud*, karena *fraud* dalam perusahaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti *management fraud* dan *white collar crime* (kecurangan yang dilakukan oleh kalangan atas) (Agoes, 2012:213).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib & Rini (2016) yang menyatakan bahwa *Islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugerah (2014) yang menyatakan bahwa GCG dapat mengurangi tingkat *fraud*. Penelitian yang

dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) menyatakan bahwa *board Structure* dan *CEO power* berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perbankan syariah.

4.4.4 Pengaruh Internal Control terhadap Indikasi Terjadinya Fraud

Internal control merupakan sebuah standar yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas dalam perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian statistik, secara parsial *internal control* tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian menolak hipotesis keempat (H_4).

Hal ini diperkirakan karena berdasarkan perhitungan data peringkat internal audit yang tinggi namun tingkat *internal fraud* yang terjadi dalam bank syariah masih tinggi, sehingga *internal control* yang diukur dengan proksi penerapan audit internal tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Salah satu penyebab terjadinya *fraud* adalah kelemahan pengendalian internal yang disebabkan oleh tidak berfungsinya bagian internal audit dalam suatu perusahaan (Agoes, 2013:213). Peranan internal auditor sangat besar dalam mencegah terjadinya kecurangan pada bank syariah. Fungsi internal audit adalah memberikan jasa penjaminan bagi perusahaan untuk efisiensi operasi dan dan pengendalian internal (Anugerah, 2014).

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh spatacean (2012) yang menyatakan bahwa peningkatan efektivitas dari *internal control* akan mengurangi risiko terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Thoyibatun (2012) juga menyatakan bahwa kesesuaian sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap perilaku tidak etis, demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Manurung et al. (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh negatif terhadap kecurangan pegawai dengan efektivitas *internal control* sebagai variabel moderating.

5 Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1) *Islamic Corporate Governance* dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS,

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan *internal control* secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015 dan menolak hipotesis pertama (H_1).

- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015 dan menolak hipotesis kedua (H_2).
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015 dan menolak hipotesis ketiga (H_3).
- 4) *Internal control* tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015 dan menolak hipotesis keempat (H_4).

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik di masa yang akan datang, diantaranya adalah:

- 1) Penelitian ini hanya meneliti pada Bank Umum syariah, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk semua perbankan syariah seperti Unit Usaha Syariah (UUS) dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- 2) Penelitian ini menggunakan rentang waktu yang singkat, yaitu selama 5 tahun dari periode 2011 samapi dengan 2015.
- 3) Pemilihan indikator yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap *fraud* hanya mengambil dua variabel dari *Islamic Corporate Governance* yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Hal ini memungkinkan adanya indikator lain yang memiliki pengaruh lebih besar dibanding kedua indikator tersebut.
- 4) Nilai R^2 dalam penelitian ini masih sangat rendah, yang berarti masih banyak variabel independen lain yang mempengaruhi *fraud* yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, antara lain:

5.3.1 Saran Akademis

- 1) Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tidak hanya pada Bank Umum Syariah, disarankan untuk memperluas dengan menambahkan jenis lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Unit Usaha Syariah, Badan Pembiayaan Rakyat Syariah dan Asuransi Syariah.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi lain yang berbeda untuk mengukur variabel *Islamic Corporate Governance* dan *internal control*.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah rentang waktu penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal.

5.3.2 Saran Praktis

- 1) Untuk instansi perbankan syariah sebaiknya memperhatikan dan meningkatkan tata kelola berdasarkan prinsip syariah untuk dapat mengurangi terjadinya *internal fraud* dalam kegiatan perbankan dan melakukan pengawasan yang lebih baik.
- 2) Untuk lembaga keuangan syariah lainnya sebaiknya dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan dapat menerapkan strategi anti *fraud* yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi indikasi terjadinya *fraud* terutama *internal fraud*.

Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh. Akuntan Publik*. Buku 1. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. 2013. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh. Akuntan Publik*. Buku 2. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Anugerah, Rini. 2014. Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. 3 (1): 101-113.
- Asrori. 2014. Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap

- Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 6 (1): 90-102.
- Bologna, G. Jack and Robert. J. Linquisdt. 1995. *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tolls and Techniques*, John Wiley & Sons, Inc.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Syariah*.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Good Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti fraud Bagi Bank Umum Syariah*.
- Baz, Rayaan., Rose Shamsiah., Ayoib B. Che-Ahmad & Oluwatoyin Muse Johnson Popoola. 2016. Capability Component of Fraud and Fraud Prevention in the Saudi Arabian Banking Sector. *International Journal of Economies and Financial Issues*. 6 (S4): 68-71.
- Bhayangkara, IBK. 2015. *Audit Manajemen: Prosedur dan Implemtasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Foazan, Akhmad. 2013. Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. 7 (1).
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariatif dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kusumadewi, Anggi & Erick Tanjung. 2013. Kronologi Kasus Kredit Fiktif Rp102 M di Bank Syariah Mandiri Bogor. Melalui <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/453908-kronologi-kasus-kredit-fiktif-rp102-m-di-bank-syariah-mandiri-bogor>. Diakses pada 7 Oktober 2016.
- Manurung, Daniel., Agataha Rinta Suhartadi & Nugraha Saefuddin. 2015. The Influence of Organizational Commitment on Employee Fraud with Effectiveness of Internal Control and Organizational Justice as a Moderating Variable. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 211: 1064-1072.
- Maradita, Aldira. 2012. Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika*. 12 (2).
- Mollah, Sabur & Mahbub Zaman. 2015. Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*. 58: 418-435.
- Najib, Haifa & Rini. 2016. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud di Bank Syariah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2016*.
- Ponduri., V. Sailaja & Syeda Amina Begum. 2014. Corporate Governance – Emerging Economies Fraud and Fraud Prevention. *IOSR Journal of Business and Management*. 16 (3): 01-07.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. 2010. Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. *Progi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo*. 12 (1): 27-36.
- Puspitasari, Elen. 2009. Corporate Governance Lembaga Keuangan Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. 1 (1).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Rini. 2014. The Effect of Audit Committee Role and Sharia Supervisory Board Role on Financial Reporting Quality at Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*. 17 (1): 145-156.
- Sanusi, Zuraidah Mohd., Mohd Nor Firdaus Rameli & Yusari Mat Isa. 2015. Fraud Schemes in The Banking Institutions: Prevention Measures to Avoid Severe Financial Loss. *Procedia Economies and Finance*. 28: 107-113.
- Sadikin, Rendy. 2014. Bank Mega Syariah Terseret Kasus Gadai Emas Seret. Melalui <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/10/bank-mega-syariah-terseret-kasus-gadai-emas-seret>. Diakses pada 7 Oktober 2016.
- Sekaran, Uma & Roger Bogie. 2013. *Research Methods for Business*. Sixth Edition. Wiley.
- Singleton, W. Tommie and Aaron J. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, John Wiley & Sons, Inc.

- Spatacean, Ioan-Ovidion. 2012. Addressing Fraud Risk by Testing the Effectiveness of Internal Control over Financial Reporting – Case of Romanian Financial Investment Companies. *Procedia Economics and Finance*. 3: 230-235.
- Sula, Atik Emilia, Moh. Nizarul Alim dan Prasetyo. 2014. Pengawasan, strategi Anti Fraud dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA*. 2 (2).
- Syukron, Ali. 2012. Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 2 (1): 22-41.
- Thoyibatun, Siti., Made Sudarma & Eko Ganis Sukoharsono. 2009. Analysing The Influence Of internal Control Compliance and Compensation System Against Unethical Behavior and Accounting Fraud Tendency (Studies at State University In East Java. *Simposium Nasional Akuntansi 12, Palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Thoyibatun, Siti. 2012. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Akuntansi serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 16 (2): 245-260.
- Wijaya, Angga Sukma. 2012. Kasus Gadai Emas Perburuk Citra Produk Syariah. Melalui https://m.tempo.co/read/news/2012/10/04/087433724/kasus_gadai-emas-perburuk-citra-produk-syariah. Diakses pada 5 Oktober 2016.
- Yaya, Rizal., Aji Erlangga Martawireja & Ahim Abdurahim. 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuwannita, Auliana & Nita Erika Ariani. 2016. Analisis Hubungan Pengendalian Internal Versi Coso Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Baitul Qiradh Anggota Pusat Koperasi Syariah Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 1 (1): 199-209.

Lampiran

Hasil Regresi Penelitian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	13,54822548
Most Extreme Differences	Absolute	,246
	Positive	,246
	Negative	-,242
Test Statistic		,246
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 23 (2017)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,095 ^a	,009	-,064	14,03514	,966

a. Predictors: (Constant), Internal control, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS

b. Dependent Variable: Fraud

Sumber: Output SPSS 23 (2017)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73,250	3	24,417	,124	,945 ^b
	Residual	8076,394	41	196,985		
	Total	8149,644	44			

a. Dependent Variable: Fraud

b. Predictors: (Constant), Internal control, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS

Sumber: Output SPSS 23 (2017)

Coefficients

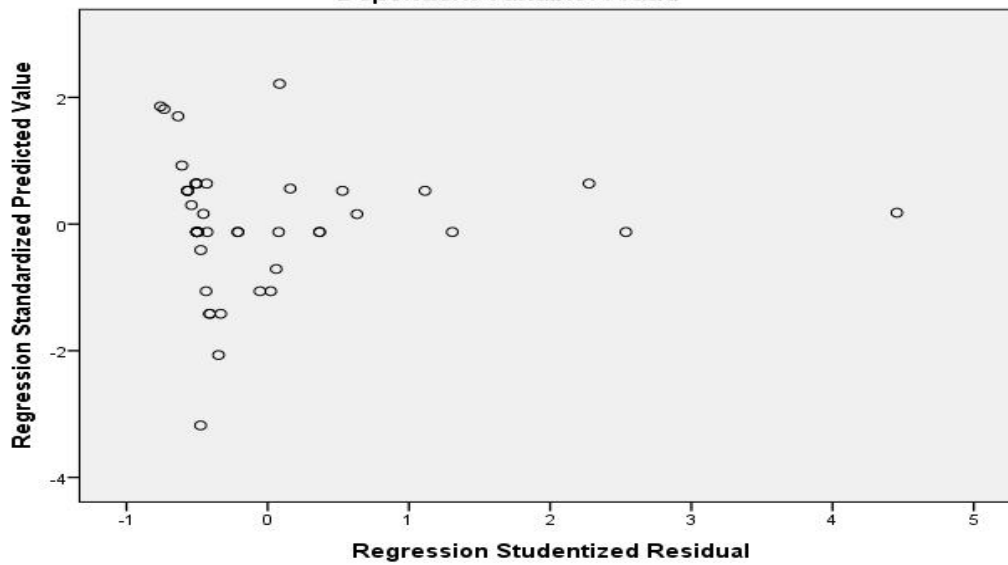
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9,486	6,389		1,485	,145		
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	16,655	57,478	,077	,290	,773	,340	2,938
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	-14,739	30,981	-,125	-,476	,637	,351	2,848
Internal control	-7,326	16,528	-,074	-,443	,660	,878	1,139

a. Dependent Variable: Fraud

Sumber: Output SPSS 23 (2017)

Scatterplot

Dependent Variable: Fraud



Sumber: Output SPSS 23 (2017)

LAMPIRAN 2
Hasil Regresi Penelitian dengan Data dalam Bentuk Logaritma Natural

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		26
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,31033907
Most Extreme Differences	Absolute	,136
	Positive	,136
	Negative	-,071
Test Statistic		,136
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 23 (2017)

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,12138
Cases < Test Value	13
Cases >= Test Value	13
Total Cases	26
Number of Runs	13
Z	-,200
Asymp. Sig. (2-tailed)	,841

- a. Median

Sumber: Output SPSS 23 (2017)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,247 ^a	,061	-,067	1,39683	1,613

- a. Predictors: (Constant), LNX3, LNX2, LNX1
- b. Dependent Variable: LNY

Sumber: Output SPSS 23 (2017)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,786	3	,929	,476	,702 ^b
	Residual	42,925	22	1,951		
	Total	45,711	25			

- a. Dependent Variable: LNY
- b. Predictors: (Constant), LNX3, LNX2, LNX1

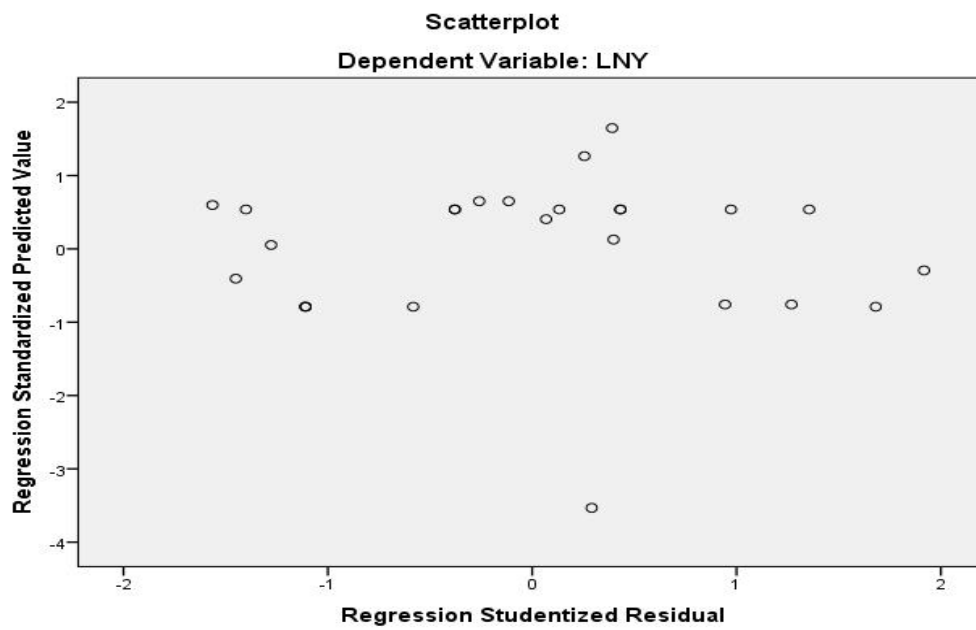
Sumber: Output SPSS 23 (2017)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,586	1,718		,923	,366		
LNX1	,454	1,190	,123	,382	,706	,408	2,452
LNX2	,177	1,127	,050	,157	,877	,418	2,390
LNX3	-,534	,567	-,203	-,943	,356	,917	1,091

a. Dependent Variable: LNY

Sumber: Output SPSS 23 (2017)



Sumber: Output SPSS 23 (2017)